KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Unair sudah selesaikan temuan BPK
Tanggal : Kamis, 06 September 2012
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Unair Sudah Selesaikan Temuan BPK

Amri Amrullah

SURABAYA — Universitas Airlangga (Uair) Surabaya sudah menyelesaikan masalah administrasi terkait temuan penyimpangan pengelolaan keuangan di kampusnya.

Wakil Rektor II Unair M Nasih menyatakan, Unair kaget karena masih dimasukkan ke dalam daftar institusi pendidikan yang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010. Padahal, Unair sudah menuntaskan masalah kekurang-lengkapan administrasi seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu sudah selesai dan tuntas," kata M Nasih kepada*Republika*, Rabu (5/9).

Sebelumnya. Badan Akuntabilitas´Keuangan Negara (BAKN) DPR menemukan berbagai indikasi penyimpangan dalam kinerja keuangan 16 perguruan tinggi negeri (PTN). Salah satu dari 16 perguruan tinggi negeri tersebut adalah Unair.

Hasil penyimpangan kinerja keuangan 16 PTN berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang ditelaah BAKN. LHP yang ditelaah adalah LHP keuangan Kemendikbud untuk anggaran tahun 2008, 2009, dan 2010

Anggota BAKN DPR Eva Kusuma Sundari menjelaskan, kejanggalan penggunaan keuangan terdapat pada masalah perencanaan yang tidak sesuai aturan serta penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang bersifat proforma dan berindikasi kemahalan serta melanggar Keppres 80 Tahun 2003.

"Praktik yang tidak sesuai prinsip *money follows functions* ini totalnya sebesar Rp 137,3 miliar," kata Eva.

M Nasih menerangkan, Unair memang termasuk perguruan tinggi yang diperiksa oleh BPK terkait dengan pengadaan barang/jasa pada 2008, 2009, dan 2010. "Namun, temuan BPK itu sudah tuntas, sudah diselesaikan."

Menurut Nasih, temuan BPK kebanyakan bersifat administratif. Karena itu, Unair sudah melaksanakan semua rekomendasi BPK untuk menyelesaikan kekurangan administrasi tersebut. "Kita sudah menyerahkan semua dokumen tindak lanjut kepada BPK maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BPK maupun Itjen bisa menerima tindak lanjut Unair ini," katanya.

Sekretaris Unair Hadi Subhan mengungkapkan, temuan BPK pada pengadaan tahun 2008, 2009, dan 2010bersifat administratif, yakni penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan tidak menggunakan format kertas kerja yang baku. "Ini dinilai berpotensi menyebabkan kesalahan perhitungan dan mengurangi ketelitian. Setelah diberi rekomendasi BPK, semuanya 100 persen kita tindak lanjuti," kata Hadi. ■ ed: eh ismail

PERPUSTAKAAN DPR RI